

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pasca Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD

Dr. Dedi Taufik, M.Si

KETUA ASOSIASI PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH SE-INDONESIA (APPDI)

Yogyakarta, 5 Juli 2023



#workingtogether

#smilingforever

#payyourtaxes



SISTEMATIKA



1

2

3

PENDAHULUAN

ISU – ISU &
TANTANGAN
IMPLEMENTASI
UU HKPD

EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN



KONDISI UMUM APBD PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



KETERGANTUNGAN KEPADA TKD :

*Mayoritas Pemda Masih
Tergantung kepada
Pendapatan Transfer dari
Pemerintah Pusat*



HABIS UNTUK BELANJA PELAYANAN DASAR:

*Tidak cukup untuk membiayai
sektor Produktif*

KURANG INOVASI/ BUSINESS AS USUAL

*Belum Bisa
Menemukan Sumber
Pendapatan Baru dari
PAD*

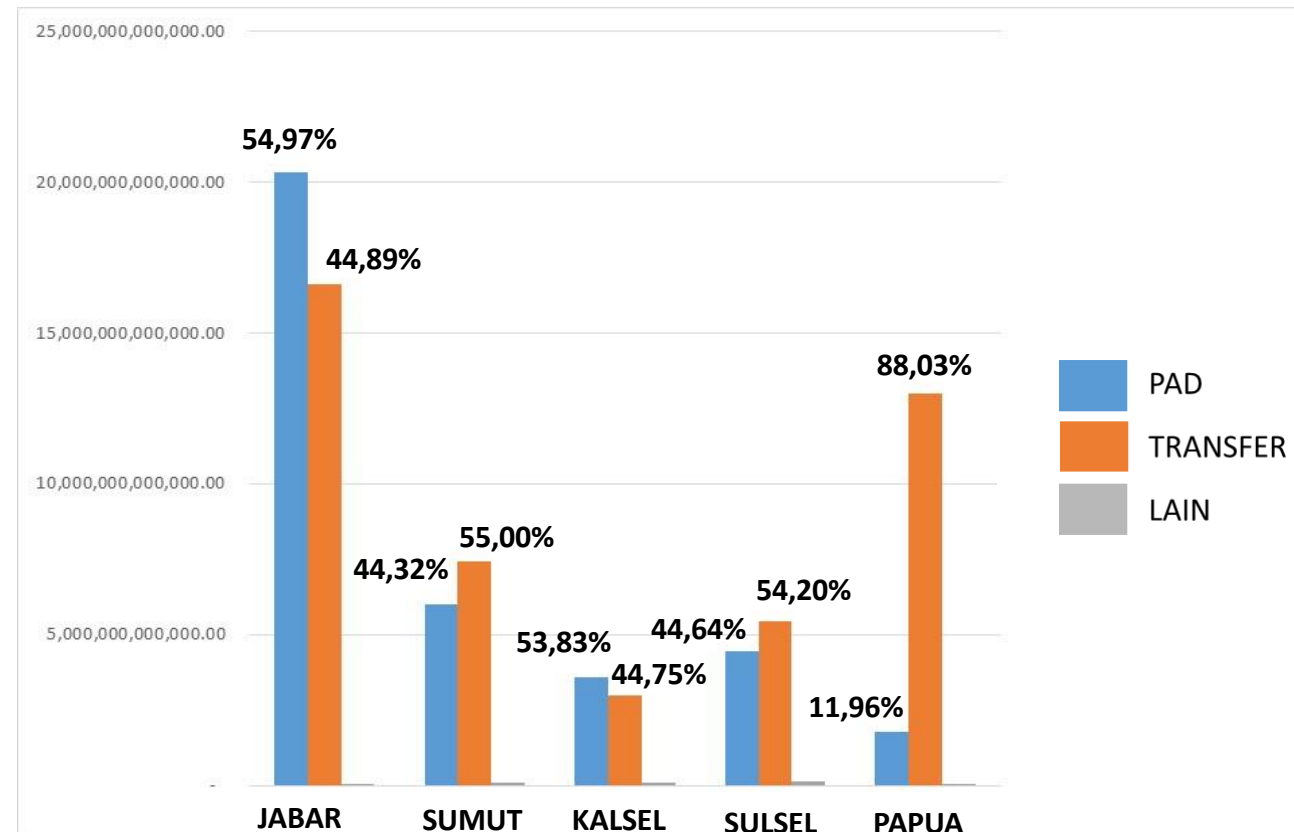


PROGRAM BERSIFAT JANGKA PENDEK DAN TIDAK SINERGI

*belum
berkesinambungan
dan bersinergi
lintas program*



REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI **JAWA BARAT**, **SUMATERA UTARA**, **KALIMANTAN SELATAN**, **SULAWESI SELATAN** & **PAPUA** TAHUN 2021

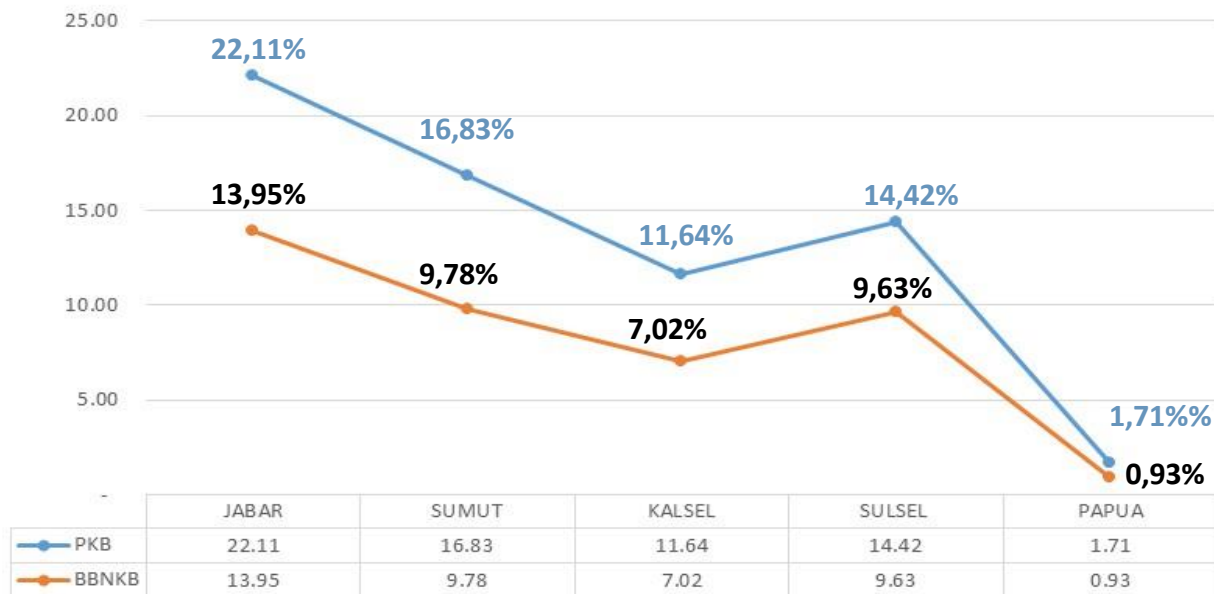


URAIAN	REALISASI TAHUN 2021				
	JABAR	SUMUT	KALSEL	SULSEL	PAPUA
PENDAPATAN	36,991,873,224,931.40	13,517,499,452,000.00	6,623,086,492,762.30	10,011,411,879,079.40	14,763,746,029,000.00
1. PAD	20,333,679,966,126.40	5,991,151,366,000.00	3,564,914,942,945.30	4,468,886,234,709.42	1,765,651,610,000.00
2. PENDAPATAN TRANSFER	16,606,086,315,554.00	7,434,780,086,000.00	2,964,090,024,366.00	5,426,146,349,398.00	12,996,594,419,000.00
3. PENDAPATAN LAIN	52,106,943,251.00	91,568,000,000.00	94,081,525,451.00	116,379,294,972.00	1,500,000,000.00
PKB	8,179,965,230,060.00	2,275,499,564,512.00	770,624,936,511.00	1,443,367,733,721.00	252,364,581,300.00
BBNKB	5,161,845,470,700.00	1,321,798,618,689.00	465,053,893,287.00	964,002,920,367.00	137,229,698,000.00

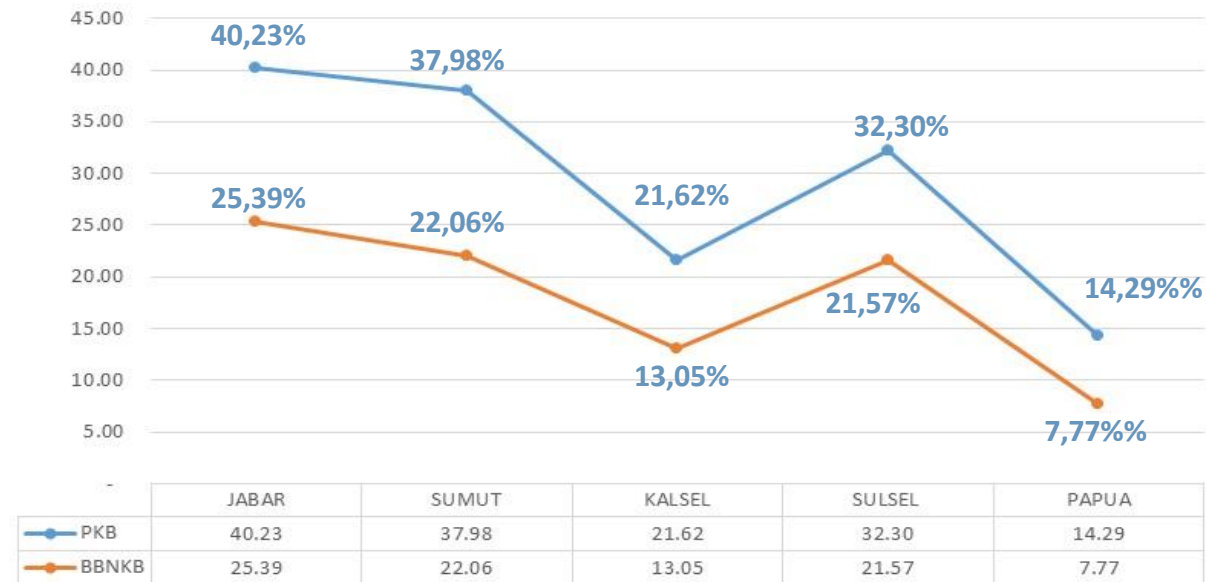
PROPORSI PKB & BBNKB PADA PENDAPATAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT, SUMATERA UTARA, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI SELATAN & PAPUA TAHUN 2021



PROPORSI REALISASI
PKB DAN BBNKB TERHADAP PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021



PROPORSI REALISASI
PKB DAN BBNKB TERHADAP PAD TAHUN 2021



6 (ENAM) STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAD





SISTEMATIKA



ISU – ISU & TANTANGAN IMPLEMENTASI UU HKPD

ISU – ISU Pengelolaan Pajak dan Retribusi (dalam UU HKPD)

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang **Pajak dan Retribusi Daerah**;
2. Penurunan pendapatan sebagai dampak implementasi opsen PKB dan BBNKB yaitu adanya **penurunan** besaran pajak bersumber PKB dan BBNKB bagi **provinsi sebesar 14%** sementara disisi lain, **Kabupaten/Kota** mengalami **kenaikan sebesar 32%**;
3. **Penyelenggaraan Samsat** pasca implementasi UU HKPD
4. **Penegakan hukum** yang efektif bagi penunggak pajak;
5. **Kelembagaan, Sumber Daya Manusia** dan **insentif** pemungut pajak;
6. Penghapusan **BBNKB 2**;
7. Penghapusan PKB bagi **kendaraan listrik** atau berbasis batere.



TANTANGAN Pemerintah Daerah Provinsi (dalam Penyusunan PERDA PDRD)

1. Kebijakan **tarif** PKB, BBNKB dan **opsen** Kabupaten kota yang **tidak membebani** masyarakat
2. Harmonisasi **tarif** PKB, BBNKB dan PBBKB dengan **provinsi lain**
3. **Peran Kabupaten dan kota** dalam pemungutan PKB dan BBNKB
4. Pemungutan PAP terhadap **badan usaha** yang memanfaatkan air namun tidak memiliki **SIPA** atau **habis masa SIPA**
5. Pengaturan pengelolaan **non pajak/retribusi** dalam Perda
6. Pengecualian PAP atas **pemanfaatan air laut dan payau**
7. Pengecualian PKB atas **kendaraan listrik** dan **energi terbarukan**

REKOMENDASI PEMERINTAH PROVINSI TERKAIT IMPLEMENTASI UU HKPD DI DAERAH



KEBIJAKAN

- REVISI PERPRES 5 TAHUN 2015 TENTANG SAMSAT
- PENGUATAN DANA BAGI HASIL PPN DAN PPH UNTUK DAERAH TERUTAMA PROVINSI

TEKNIS

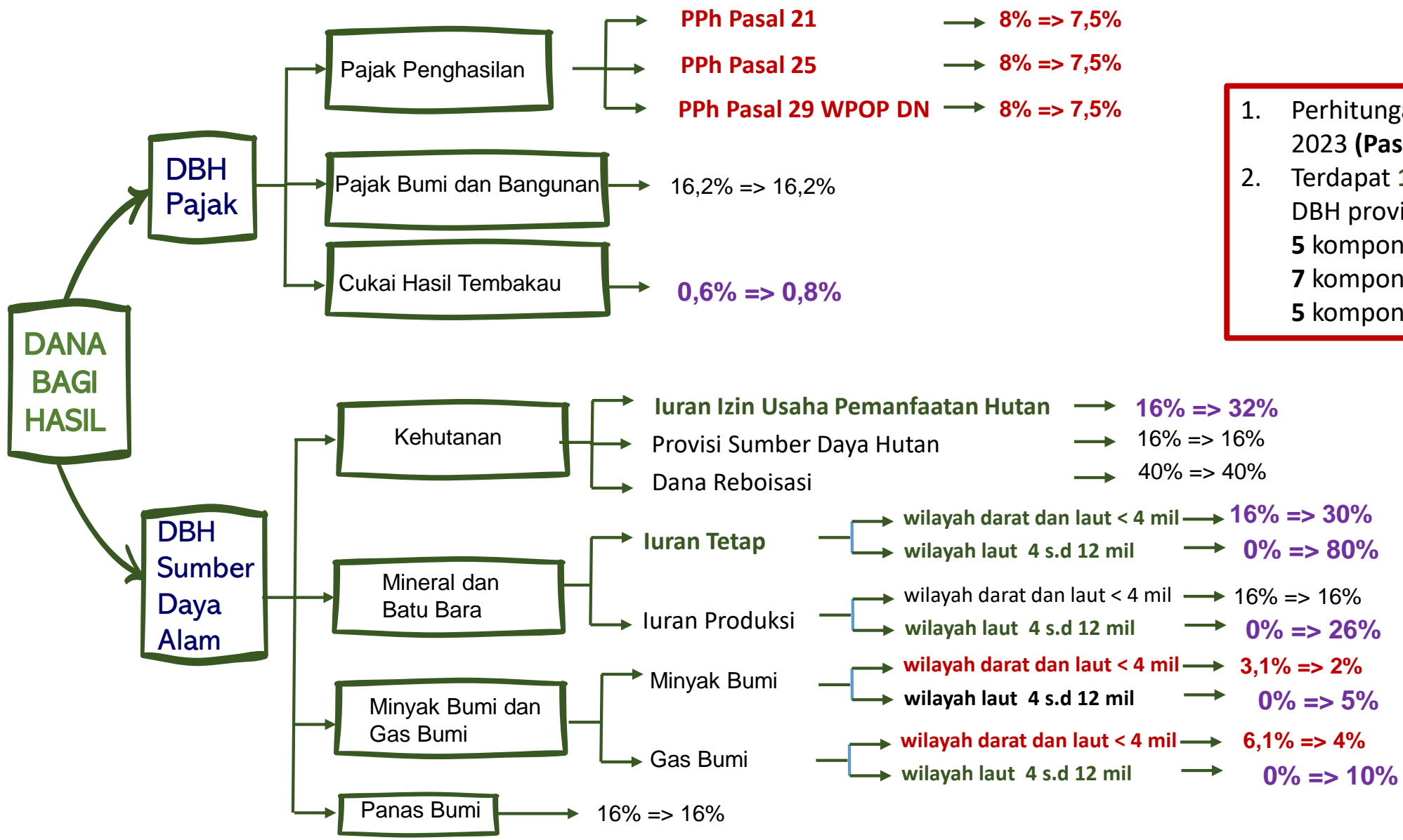
- FASILITASI INTEGRASI DATA PENGGUNAAN BBM SEBAGAI DASAR PBBKB DENGAN BPH MIGAS
- FASILITASI PENETAPAN STANDAR KODE KENDARAAN DENGAN KEMENTERIAN
- FASILITASI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PERPAJAKAN DI DAERAH

PENGAWASAN

- PENGAWASAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI LAYANAN SAMSAT
- PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DANA TRANSFER DI KEMENTERIAN KEUANGAN
- PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DAN 25 DI PERUSAHAAN BESAR



Telaah DANA BAGI HASIL (DBH) **untuk Provinsi** dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD



1. Perhitungan DBH berlaku pada Tahun 2023 (**Pasal 191**)
2. Terdapat **17 Komponen** perhitungan DBH provinsi yang diatur, dimana **5** komponen mengalami **penurunan**, **7** komponen mengalami **kenaikan** dan **5** komponen lainnya **tetap**;



SISTEMATIKA



EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

KOLABORASI PENDANAAN PEMBANGUNAN



Strategi Optimalisasi Penerimaan PPh Sumber DBH



Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Daftar

Hitung Sendiri

Bayar

Lapor

Kolaborasi dengan Pemprov, Kab,Kota melalui Kebijakan dalam mendukung Pengawasan Kewajiban Perpajakan

Identifikasi

Registrasi

Pengawasan

Edukasi dan Sosialisasi

Pengawasan

1

NPWP Cabang

2

Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Jawa Barat, sudah menyusun PerGub No 35 th 2013 yang mengatur Kewajiban NPWP Cabang bagi WP yang melakukan usaha di Jawa Barat

- ✓ Pertukaran data
- ✓ Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)

- Kewajiban NPWP dan pelaporan SPT

Diperlukan optimalisasi implementasi NPWP Cabang, PKS dan KSWP agar penerimaan pusat dan daerah meningkat termasuk penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Pemprov, Pemkab dan Kota

PELUANG PENDAPATAN DARI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN (AIR PAYAU)

Objek PAP yang **DIKECUALIKAN** oleh UU 1/2022 tentang HKPD

PAP Pasal 28 Ayat 2:

e. Kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau)



● = Potensi Lahan Budidaya Air Tawar; ● = Potensi Lahan Budidaya Air Payau; ● = Potensi Lahan Budidaya Laut



PELUANG PENDAPATAN DARI PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA

Pengertian:

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit) di mana pembelinya adalah yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas aturan.

Kredit karbon, yaitu representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO₂). Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau.

Sektor penyumbang emisi karbon di Indonesia:

- kehutanan dan lahan pertanian,*
- energi dan transportasi, limbah, serta*
- proses industri dan penggunaan produk.*



Kebijakan untuk mendukung perdagangan karbon:

- Restorasi lahan gambut
- Rehabilitasi mangrove
- Pencegahan deforestasi menjadi lahan pertanian
- Bidang persampahan (pengembangan ekonomi sirkular).
- Bidang fiskal rencana penerapan pajak karbon dan penghapusan subsidi energi secara menyeluruh pada 2030.
- Bidang energi dan transportasi, insentif bagi kendaraan listrik hingga 95 persen dari total kendaraan dan penggunaan energi baru terbarukan (EBT)



Terima Kasih



@bapenda.jabar



@deditaufik_





Implementasi Penerapan Tarif PBBKB terhadap harga jual BBM

CONTOH TANTANGAN

Pasal 26 ayat (1) UU HKPD :
Tarif PPBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

UU NO 28 TAHUN 2009

TARIF EKSTING (5%)

Jenis BBM	Harga Dasar BBM	PBBKB (5%)	PPN (11%)	Harga Jual BBM
Pertalite	8,621	431	948	10,000
BioSolar	5,862	293	645	6,800
Pertamax	12,500	625	1,375	14,500
Pertamax Turbo	13,103	655	1,441	15,200
Dexlite	15,776	789	1,735	18,300
Pertamina Dex	16,207	810	1,783	18,800

Catatan :

Harga Jual BBM per 31 Desember 2022

UU NO 1 TAHUN 2022

TARIF MAKSIMAL (10%)

Harga Dasar BBM	PBBKB (10%)	PPN (11%)	Harga Jual BBM	Kenaikan Harga Jual BBM
8,621	862	948	10,431	431
5,862	586	645	7,093	293
12,500	1,250	1,375	15,125	625
13,103	1,310	1,441	15,855	655
15,776	1,578	1,735	19,089	789
16,207	1,621	1,783	19,610	810

TARIF ALTERNATIF (7,5%)

Harga Dasar BBM	PBBKB (7,5%)	PPN (11%)	Harga Jual BBM	Kenaikan Harga Jual BBM
8,621	647	948	10,216	216
5,862	440	645	6,947	147
12,500	938	1,375	14,813	313
13,103	983	1,441	15,528	328
15,776	1,183	1,735	18,694	394
16,207	1,216	1,783	19,205	405

Harga Jual BBM Naik



DIPERLUKAN HARMONISASI TARIF DENGAN PROVINSI SEKITAR/TETANGGA

Simulasi Penerapan Tarif PBBKB di Jawa Barat (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)



UU NO 28 TAHUN 2009

Tarif Eksisting 5%

Rincian Objek PBBKB	Realisasi 2022
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,998,881,917,774
1. PBBKB-Bahan Bakar Bensin	2,299,753,745,276
2. PBBKB-Bahan Bakar Solar	636,273,861,974
3. PBBKB-Bahan Bakar Gas	530,258,394
4. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	62,324,052,130

Pasal 26 ayat (1) UU HKPD :
Tarif PPBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

UU NO 1 TAHUN 2022

Tarif Maksimal 10 %

Simulasi Realisasi 2022	Kenaikan	%
5,997,763,835,548	2,998,881,917,774	100.00
4,599,507,490,553	2,299,753,745,276	100.00
1,272,547,723,948	636,273,861,974	100.00
1,060,516,788	530,258,394	100.00
124,648,104,260	62,324,052,130	100.00



Peningkatkan penerimaan
PBBKB 100%

Tarif Alternatif 7,5%

Simulasi Realisasi 2022	Kenaikan	%
4,498,322,876,661	1,499,440,958,887	50.00
3,449,630,617,914	1,149,876,872,638	50.00
954,410,792,961	318,136,930,987	50.00
795,387,591	265,129,197	50.00
93,486,078,195	31,162,026,065	50.00



Peningkatkan penerimaan
PBBKB 50%